

ABSTRAK
TINJAUAN ALAT BERAT SEBAGAI OBJEK PAJAK DAN
POTENSINYA BAGI PENDAPATAN ASLI DAERAH

PROVINSI LAMPUNG

Oleh

SATRIO PAKSI WICAKSONO

Pasca diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa alat berat tidak dapat lagi dikenakan pajak oleh pemerintah daerah, namun dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, alat berat kembali dikenakan pajak dengan nama Pajak Alat Berat, sehingga Pemerintahan Daerah Provinsi dapat kembali memungut pajaknya, termasuk Provinsi Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Pertama, bagaimanakah kedudukan alat berat sebagai objek pajak daerah di Provinsi Lampung, kedua, bagaimanakah potensi pajak alat berat bagi pendapatan asli daerah Provinsi Lampung.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan : Pertama, keberadaan alat berat di Provinsi Lampung masih eksis, ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai peraturan baru sehingga alat berat kembali dapat dikenakan pajak. Kedua, potensi pajak alat berat bagi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung itu ada selama masih diatur didalam Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah itu jumlahnya sedikit. Pada masa tenggang 3 tahun berlakunya UU PDRD pasca Putusan MK terhadap pengenaan pajak atas alat berat, potensi alat berat masih juga belum sesuai sasaran. Setelah masa tenggang tersebut habis potensi terhadap pajak alat berat hilang. Ditahun 2024 pajak alat berat mulai dipungut dan didata kembali di Provinsi Lampung pasca adanya UU HKPD, untuk potensinya sendiri akan terlihat di tahun 2025.

Kata Kunci : Alat Berat, Objek Pajak, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

OVERVIEW OF HEAVY EQUIPMENT AS A TAX OBJECT AND ITS POTENTIAL FOR REGIONAL ORIGINAL INCOME OF LAMPUNG PROVINCE

By

SATRIO PAKSI WICAKSONO

After the decision of the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XV/2017 which states that heavy equipment can no longer be taxed by regional governments, however, with the enactment of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations Between the Central Government and Regional Governments, heavy equipment is again subject to tax. tax under the name Heavy Equipment Tax, so that Provincial Governments can collect taxes again, including Lampung Province. The problems in this research are: First, what is the position of heavy equipment as a regional tax object in Lampung Province, second, what is the potential for heavy equipment tax for local revenue in Lampung Province.

The approach used in this research is an empirical juridical approach, namely legal research regarding the application or implementation of normative legal provisions in action at each specific legal event that occurs in society.

The results of this research show: First, the existence of heavy equipment in Lampung Province still exists, marked by the issuance of Lampung Province Regional Regulation Number 4 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Levies as a new regulation so that heavy equipment can again be taxed. Second, the potential for heavy equipment tax for Lampung Province's Original Regional Income exists as long as it is still regulated in Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies. The amount is small. During the 3 year grace period for the enactment of the PDRD Law following the Constitutional Court's decision regarding the imposition of tax on heavy equipment, the potential of heavy equipment is still not up to the mark. After the grace period expires, the potential for heavy equipment tax is lost. In 2024 heavy equipment taxes will begin to be collected and recorded again in Lampung Province following the HKPD Law, the potential will be visible in 2025.

Keywords: Heavy Equipment, Tax Objects, Original Regional Income